

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allen W. Wood, *Kantian Ethics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum dan Politik*, Jakarta, Konstitusi Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Keadilan dan Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hukum: Strategi Toreh Bumi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Ayu Dewi Rachmawati Hartana, *Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah*, Bali, Universitas Pendidikan Ganesha Press, 2019.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- D. Kurniawan, *Mafia Tanah dan Penyalahgunaan Sistem Pendaftaran Tanah*, dalam *Buku Tinjauan Sistem Pertanahan*, Jakarta, Graha Ilmu, 2021.
- Diana R. W. Napitupulu, *Hukum Agraria*, Jakarta, UKI Press, 2023.
- Diana R. W. Napitupulu, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, UKI Press, 2023.
- Diana R. W. Napitupulu, *Sertipikat Elektronik Hak Atas Tanah: Pembuktian dan Kepastian Hukumnya*, Jakarta, UKI Press, 2024.
- Elza Syarief, *Tanah dan Mafia Tanah: Persoalan dan Solusi*, Jakarta, Gramedia, 2018.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1959.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Jakarta, Insist Press, 2009.

- Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, *Tanah dan Kekuasaan: Sketsa Korupsi Agraria di Indonesia*, Jakarta, Lokataru Foundation, 2021.
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-29, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008.
- M.E. Winarno, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan Khairandy, *Mafia Tanah dan Permasalahan Agraria di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2021.
- R. Subekti, *Masalah Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, *Hukum Agraria*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, New York, Benziger Bros Press, 1947.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.
- Yuliandi, *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, Medan, Media Nusa Creative, 2021.
- Aries S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, *Hukum Agraria*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

- Ahmad Ali, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2018.
- Haris S., “Mafia Tanah dan Administrasi Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Imron Rosyadi, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2007.
- J. Pratama, “Kekerasan dalam Kasus Mafia Tanah di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- M. Sulaiman, “Kolusi dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 21, No. 2, 2021.

D. Media/Artikel

- Kementerian ATR/BPN, *Laporan Tahunan PTSL dan Tata Kelola Pertanahan Nasional*, Jakarta, Kementerian ATR/BPN, 2022.
- USAID, *Laporan Studi Sistem Informasi Pertanahan di Indonesia*, Jakarta, USAID – Land Reform Program, 2018

Online

- Kementerian ATR/BPN, “Transformasi Digital Layanan Pertanahan: Sertipikat Tanah Elektronik,” *atrbpn.go.id*, diakses 20 Mei 2025, dari <https://www.atrbpn.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Data Statistik Fintech,” www.ojk.go.id, diakses 2 Mei 2025, dari <https://www.ojk.go.id>.
- Badan Pertanahan Nasional, “Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik,” *atrbpn.go.id*, diakses 3 Mei 2025, dari <https://www.atrbpn.go.id>.